



The Influence of Human Resource Competence, Transparency, and Internal Control Systems on The Quality of Local Government Financial Reports at the Manado City Regional Finance and Asset Agency

Eirene Flandrina Gamani^{1*}, Jenny Morasa², Wulan D. Kindangen³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Eirene Flandrina Gamani

eirenegamani064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Human Resource Competence, Transparency, Internal Control System, Financial Statement Quality

Received : 18, January

Revised : 20, March

Accepted: 22, May

©2026 Gamani, Morasa, D.

Kindangen: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of HR Competence, Transparency level, and Internal Control System on the quality of government financial reporting at the Manado City Regional Finance and Assets Agency (BKAD). In its implementation, this study uses a survey-based quantitative method, by collecting primary data through the distribution of questionnaires to 60 apparatus within the Manado City BKAD. The series of data processing processes includes validity tests, reliability checks, fulfillment of classical assumption prerequisites, application of multiple linear regression, and hypothesis testing which includes t-test, F test, and determination of determination coefficients. The findings of the investigation indicate that partially, the transparency variable is the only factor that has a real influence on the quality of financial statements. On the other hand, the variables of staff competence and internal control systems do not make a significant contribution when reviewed separately.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Eirene Flandrina Gamani^{1*}, Jenny Morasa², Wulan D. Kindangen³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Nama penulis eirenegamani064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

Received : 18, Januari

Revised : 20, Maret

Accepted: 22, Mei

©2026 Gamani, Morasa, D.

Kindangen: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM, tingkat Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado. Dalam pelaksanaannya, studi ini menggunakan metode kuantitatif berbasis survei, dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 60 aparatur di lingkungan BKAD Kota Manado. Rangkaian proses pengolahan data mencakup uji validitas, pemeriksaan reliabilitas, pemenuhan prasyarat asumsi klasik, penerapan regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji F, dan penentuan koefisien determinasi. Temuan investigasi mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel transparansi menjadi satu-satunya faktor yang memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, variabel kompetensi staf dan sistem pengendalian internal tidak memberikan kontribusi signifikan apabila ditinjau secara terpisah.

PENDAHULUAN

Mewujudkan *good governance* mensyaratkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Bukan hanya perihal teknis pengalokasian dana, proses ini juga menuntut tanggung jawab penuh pemerintah daerah kepada publik. Dalam hal ini, laporan keuangan berperan sebagai media strategis untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran serta menyajikan data yang akurat bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam menilai sejauh mana akuntabilitas daerah telah tercapai.

Sebagai tolok ukur utama keberhasilan tata kelola keuangan publik, laporan keuangan harus disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah berbanding lurus dengan kualitas laporan yang disajikan. Apabila laporan keuangan dinilai tidak reliabel, hal ini berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Dalam praktiknya, pencapaian kualitas laporan keuangan tersebut sangat ditentukan oleh beberapa determinan utama, yaitu kapabilitas sumber daya manusia, keterbukaan akses informasi, dan soliditas sistem pengendalian internal.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang mengelolanya. Mengacu pada pandangan Sudiarti dan Juliarsa (2020), terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan kredibilitas pelaporan keuangan. Hal ini mendasari argumen bahwa kualitas laporan keuangan sesuai standar SAP hanya dapat tercapai apabila staf pengelola memiliki pemahaman akuntansi yang mendalam. Oleh karena itu, kompetensi kognitif dan teknis aparatur dipandang sebagai pilar utama yang memastikan tersajinya laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Implementasi transparansi keuangan daerah merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Secara teoretis, transparansi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam *good governance*. Firmansyah dan Nuryani (2020) menegaskan bahwa transparansi efektif memicu keterlibatan masyarakat dalam memonitor kebijakan fiskal, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk menjalankan fungsi pelaporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang lebih ketat.

Sistem pengendalian intern (SPI) berperan sebagai landasan krusial dalam menjamin kejujuran serta akurasi pengelolaan dana pemerintah daerah. Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008, struktur ini dibangun untuk menjamin pertanggungjawaban publik melalui tiga fondasi fundamental: optimalisasi kinerja operasional, peningkatan validitas data keuangan, serta ketaatan penuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, efektivitas operasional SPI adalah elemen mutlak untuk menghasilkan laporan finansial yang tepercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesungguhnya adalah bentuk nyata dari tanggung jawab dan keterbukaan kepada masyarakat. Meskipun demikian, faktanya sering kali muncul ketimpangan antara aturan yang ditetapkan dengan aktivitas pencatatan di tingkat daerah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, masih ditemukan celah dalam mekanisme pengawasan internal serta perilaku yang kurang taat terhadap regulasi di lingkungan pemerintahan. Fenomena ini menjadi alarm penting bahwa peningkatan disiplin dalam penerapan standar akuntansi harus diselaraskan dengan tata kelola keuangan secara menyeluruh, demi mewujudkan laporan yang bermutu tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BKAD Kota Manado berfungsi sebagai fondasi vital dalam memastikan tingkat akuntabilitas dan validitas pelaporan finansial daerah. Kendati pemerintah daerah telah sukses memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023 yang menyoroti defisiensi pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta rendahnya ketaatan terhadap aturan hukum menunjukkan perlunya penilaian yang lebih mendalam. Riset ini bertujuan mengevaluasi faktor-faktor yang menentukan mutu laporan keuangan dengan menginvestigasi dampak dari kecakapan personel, tingkat keterbukaan, serta daya guna mekanisme pengendalian internal. Inti dari studi ini adalah mengukur sejauh mana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas pelaporan di BKAD Kota Manado, serta menyusun strategi mitigasi yang efektif untuk merespons temuan dari para-auditor eksternal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Studi ini mengadopsi Stewardship Theory dari Donaldson & Davis (1991) sebagai pijakan argumen utama mengenai interaksi antara principal dan steward. Perspektif ini memandang bahwa aparatur pemerintah, selaku pihak pengelola, harus mengutamakan kepentingan publik. Untuk mencapai profesionalisme tersebut, diperlukan kombinasi antara keahlian SDM yang memadai, keterbukaan akses informasi, dan sistem pengendalian intern yang kuat. Seluruh aspek ini berfungsi sebagai determinan kualitas laporan keuangan, yang secara teoretis memperkuat hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian ini.

Akuntansi

Akuntansi didefinisikan secara luas baik sebagai sistem informasi maupun seni pengelolaan data keuangan. Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018:3) memandang akuntansi sebagai sistem informasi yang bertugas mengidentifikasi, mencatat, serta mengomunikasikan aktivitas ekonomi organisasi kepada para pemangku kepentingan. Senada dengan hal tersebut, Sumarsan (2020:1) menekankan aspek prosedural akuntansi sebagai seni dalam menghimpun,

mengklasifikasi, dan mencatat transaksi keuangan untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang relevan bagi pengambil keputusan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa peran akuntansi melampaui fungsi administratif pencatatan, melainkan bertindak sebagai instrumen vital dalam penyampaian informasi ekonomi untuk menunjang pengambilan keputusan strategis.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan instrumen fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Proses ini meliputi identifikasi hingga pelaporan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Hantono et al. (2020) mengemukakan bahwa fungsi utama akuntansi pemerintah adalah merekam aktivitas ekonomi daerah secara komprehensif, sehingga menghasilkan data yang akuntabel bagi pengambilan keputusan. Melalui penerapan standar yang baku, akuntansi pemerintah menjadi pilar utama dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan di lingkungan instansi pemerintah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Terkait dengan dimensi profesionalisme, kompetensi dipandang sebagai kesiapan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Menurut Wibowo (2020: 271), kompetensi merupakan cerminan dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dibarengi dengan sikap kerja relevan, yang secara kolektif menjadi standar minimal bagi setiap aparatur dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya.

Sesuai dengan mandat dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019, standar penilaian kompetensi SDM di instansi pemerintah terdiri dari tiga indikator fundamental: penguasaan aspek teknis jabatan, kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi, serta kecakapan sosial kultural. Ketiga indikator ini mencerminkan kapasitas komprehensif yang harus dimiliki oleh setiap pegawai guna menunjang efektivitas kinerja instansi:

- a. Pengetahuan (knowledge)
- b. Keterampilan individu (Skill)
- c. Sikap Kerja (Attitude)

Transparansi

Transparansi adalah wujud keterbukaan dan kejujuran pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan menjunjung prinsip ini, pemerintah memenuhi hak publik untuk mengetahui secara utuh bagaimana pengelolaan sumber daya dilakukan serta memastikan adanya kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan dalam setiap proses pertanggungjawabannya.

Sejalan dengan pemikiran Mardiasmo (2021), transparansi dipahami sebagai manifestasi keterbukaan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Esensi dari konsep ini terletak pada ketersediaan data keuangan yang dapat dijangkau oleh publik dan anggota legislatif, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi kedua pihak tersebut untuk mengawal efektivitas kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui indikator sebagai berikut :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjadi payung hukum bagi penerapan SPIP di seluruh lingkup instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, demi tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*). Implementasi sistem ini difokuskan pada penguatan efektivitas dan efisiensi operasional, peningkatan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi di setiap aktivitas birokrasi.

Efektivitas SPIP diukur berdasarkan lima pilar utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang diselaraskan dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Kelima aspek tersebut mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi komunikasi, hingga pemantauan, yang secara kolektif beroperasi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan dan keberhasilan tujuan strategis instansi:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

Kualitas Laporan Keuangan

Sebagai media pelaporan ekonomi yang esensial, laporan keuangan berperan dalam mengomunikasikan kondisi finansial entitas kepada para pemangku kepentingan. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2022: 9), esensi dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan, efektivitas kinerja, serta arus kas organisasi. Informasi tersebut kemudian menjadi landasan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam merumuskan keputusan ekonomi yang tepat.

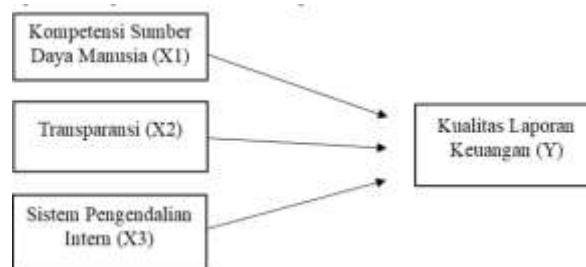
Untuk mencapai efektivitas dalam mendukung pengambilan keputusan, laporan keuangan pemerintah harus mematuhi standar karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini menekankan pentingnya kualitas informasi yang tersaji agar mencerminkan kondisi sebenarnya dan memenuhi standar pelaporan yang telah ditentukan:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Kajian Penelitian Terdahulu

- a. Mira Amalia, Sulistia Suwondo (2023). Judul penelitian : “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat)”. Hasil penelitian : Pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi SDM secara parial da simultan berengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Kuntum, Rahmiati, Baihaqi Baihaqi (2025). Judul penelitian : “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada OPD Kab. Kepahiang)”. Hasil penelitian : Kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal memperngaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara positif.
- c. Tias Monika Ferlia, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari, Mochamad Fariz Irianto (2023). Judul Penelitian: “Pengaruh Akuntabilitas, Trasnparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerinta terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)”. Hasil Penelitian : Secara simultann akuntabilitas, transparansi dana SPIP memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Namun secaa parsial hanya akuntabilitas dan SPIP yang berpengaruh positif, sementara transparansi tidak berpengaruh signifikan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

- H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H2 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H3 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menetapkan 78 pegawai BKAD Kota Manado sebagai populasi, yang tersebar di lima unit kerja utama: Bidang Akuntansi, Perbendaharaan, Anggaran, Aset, dan Sekretariat. Mengingat tujuan penelitian untuk menganalisis determinan kualitas laporan keuangan, maka metode purposive sampling diterapkan sebagai teknik pemilihan sampel.

Tempat dan Waktu Penelitian

BKAD Kota Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya yang vital sebagai pengelola keuangan daerah. Periode pelaksanaan penelitian ditetapkan selama dua bulan dengan tanggal mulai pada September 2025. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian telah disusun ke dalam linimasa yang terstruktur untuk mencakup seluruh aspek metodologis, mulai dari tahap persiapan dan perizinan, pengumpulan data empiris di lapangan, pengolahan serta analisis data, hingga tahap finalisasi penyusunan laporan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan data primer yang dihimpun melalui penyebaran kuesioner kepada responden terpilih. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel, dengan fokus utama pada pegawai BKAD Kota Manado yang terlibat langsung dalam operasional keuangan daerah. Pendekatan ini dipilih guna menjamin bahwa informasi yang diperoleh valid, representatif, dan memiliki keterkaitan kuat dengan fokus bahasan mengenai mutu pelaporan finansial pemerintah.

Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi indikator-indikator operasional dari setiap variabel penelitian. Dengan menggunakan Skala Likert (1-5), responden memberikan penilaian atas persepsi mereka. Pemilihan sampel didasarkan pada metode purposive sampling, yang secara eksklusif melibatkan pegawai BKAD Kota Manado yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pihak yang dianggap paling representatif bagi fokus penelitian ini. Guna menjamin efektivitas serta validitas data yang diperoleh, distribusi kuesioner dilaksanakan secara langsung kepada responden yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Guna menjamin akurasi dan ketepatan instrumen penelitian, dilakukan uji validitas terhadap seluruh item pernyataan dalam kuesioner.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Item	r hitung	r tabel	keterangan
X1.1	0,643	0,2542	Valid
X1.2	0,400	0,2542	Valid
X1.3	0,686	0,2542	Valid
X1.4	0,605	0,2542	Valid
X1.5	0,693	0,2542	Valid
X1.6	0,616	0,2542	Valid
X1.7	0,554	0,2542	Valid
X1.8	0,741	0,2542	Valid
X1.9	0,262	0,2542	Valid
X1.10	0,557	0,2542	Valid

Hasil pengujian validitas terhadap sepuluh item pernyataan variabel Kompetensi SDM (X1) menunjukkan konsistensi yang baik. Item X1.1 sampai X1.10 masing-masing memperoleh nilai r hitung sebagai berikut: 0,643, 0,400, 0,686, 0,605, 0,693, 0,616, 0,554, 0,741, 0,262, dan 0,557. Dengan membandingkan setiap nilai tersebut terhadap nilai kritis r tabel (0,2542), diketahui bahwa seluruh butir pernyataan telah memenuhi ambang batas validitas. Oleh karena itu, instrumen pengukuran variabel Kompetensi SDM (X1) dinyatakan valid secara statistik.

Transparansi (X2)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X2)

Item	r hitung	r tabel	keterangan
X2.1	0,616	0,2542	Valid
X2.2	0,681	0,2542	Valid
X2.3	0,670	0,2542	Valid
X2.4	0,576	0,2542	Valid
X2.5	0,363	0,2542	Valid
X2.6	0,389	0,2542	Valid
X2.7	0,389	0,2542	Valid
X2.8	0,546	0,2542	Valid
X2.9	0,684	0,2542	Valid
X2.10	0,642	0,2542	Valid

Pengujian validitas pada sepuluh item pernyataan variabel Transparansi (X2) memberikan hasil yang mendukung kelayakan instrumen. Perolehan nilai r hitung secara berurutan adalah 0,616, 0,681, 0,670, 0,576, 0,363, 0,389, 0,389, 0,546, 0,684, dan 0,642. Dengan membandingkan setiap nilai tersebut terhadap ambang batas r tabel (0,2542), dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan variable Transparansi (X2) telah memenuhi syarat validitas statistik, sehingga seluruh item dianggap reliabel untuk mengukur variabel tersebut.

Sistem Pengendalian Intern (X3)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (X3)

Item	r hitung	r tabel	keterangan
X3.1	0,726	0,2542	Valid
X3.2	0,339	0,2542	Valid
X3.3	0,690	0,2542	Valid
X3.4	0,693	0,2542	Valid
X3.5	0,583	0,2542	Valid
X3.6	0,542	0,2542	Valid
X3.7	0,618	0,2542	Valid
X3.8	0,743	0,2542	Valid
X3.9	0,708	0,2542	Valid
X3.10	0,705	0,2542	Valid
X3.11	0,657	0,2542	Valid
X3.12	0,498	0,2542	Valid
X3.13	0,648	0,2542	Valid
X3.14	0,833	0,2542	Valid

Seluruh instrumen penelitian untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) yang terdiri dari 14 butir pernyataan dinyatakan valid setelah melalui uji validitas. Berdasarkan r-hitung yang diperoleh (0,726; 0,339; 0,690; 0,693; 0,583; 0,542; 0,618; 0,743; 0,708; 0,705; 0,657; 0,498; 0,648; dan 0,833) dan dibandingkan dengan nilai kritis r-tabel (0,2542), ditemukan bahwa setiap poin pernyataan menunjukkan signifikansi korelasi yang memadai. Dengan hasil tersebut, variabel X3 memenuhi persyaratan statistik untuk melanjutkan ke proses pengujian selanjutnya.

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Item	r hitung	r tabel	keterangan
Y.1	0,674	0,2542	Valid
Y.2	0,678	0,2542	Valid
Y.3	0,656	0,2542	Valid
Y.4	0,327	0,2542	Valid
Y.5	0,720	0,2542	Valid
Y.6	0,479	0,2542	Valid
Y.7	0,338	0,2542	Valid
Y.8	0,664	0,2542	Valid
Y.9	0,471	0,2542	Valid
Y.10	0,543	0,2542	Valid

Hasil pengujian validitas terhadap sepuluh item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) menunjukkan tingkat relevansi yang memadai. Perolehan nilai r hitung secara berurutan adalah 0,674, 0,678, 0,656, 0,327, 0,720, 0,479, 0,338, 0,664, 0,471, dan 0,543. Seluruh item pernyataan dalam variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) terbukti valid secara statistik karena nilai korelasinya melampaui r tabel (0,2542). Dengan terpenuhinya kriteria validitas ini, instrumen penelitian dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis data lebih lanjut.

Uji Reabilitas

Untuk memastikan tingkat keandalan instrumen, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, yang merupakan standar untuk menguji konsistensi jawaban responden terhadap butir pernyataan dalam kuesioner.

Hasil perhitungan reliabilitas untuk masing-masing variabel penelitian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.775	0.60	Reliabel
Transparansi (X2)	0.754	0.60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0.890	0.60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.756	0.60	Reliabel

Seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Rincian perolehan nilai adalah: Kompetensi SDM (0,775), Transparansi (0,754), Sistem Pengendalian Intern (0,890), dan Kualitas Laporan Keuangan (0,756). Hasil ini mengonfirmasi bahwa instrumen kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai, sehingga data dinyatakan andal untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.98709212
Most Extreme Differences	Absolute		.079
	Positive		.079
	Negative		-.068
Test Statistic			.079
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.455
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.442
		Upper Bound	.467

Berdasarkan hasil analisis Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi 0,200 ($> 0,05$), yang memberikan bukti empiris bahwa residual model tidak menyimpang dari distribusi normal. Pengujian ini divalidasi lebih lanjut melalui prosedur Monte Carlo dengan nilai signifikansi 0,455 (tingkat kepercayaan 99%, rentang 0,442–0,467). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi telah melampaui batas $\alpha > 0,05$. Hal ini memberikan bukti statistik bahwa data residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi dinyatakan memenuhi prasyarat asumsi klasik yang ditetapkan.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas, penelitian ini berpedoman pada nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria bebas multikolinearitas tercapai jika nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan VIF berada di bawah 10.

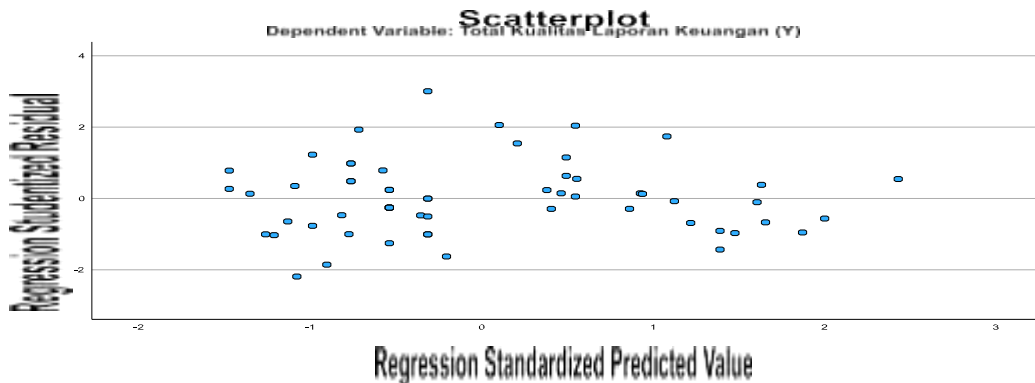
Tabel 7. Hasil uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Total Kompetensi SDM (X1)	.444	2.254
	Total Transparansi (X2)	.462	2.165
	Total SPI (X3)	.381	2.623

Sumber : Output 2025 SPSS

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 7, hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala korelasi antar-variabel independen. Dengan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk setiap variabel (X1: 2,254; X2: 2,165; X3: 2,623), model regresi dinyatakan memenuhi asumsi bebas multikolinearitas. Temuan ini menegaskan bahwa model layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Diagram Scatterplot

Sumber: Output SPSS, 2025

Analisis terhadap grafik scatterplot (Gambar 2) menunjukkan bahwa distribusi titik-titik residual tidak mengikuti pola sistematis apa pun dan tersebar merata di sekitar sumbu nol. Ketiadaan pola yang teratur, seperti penyebaran yang membentuk kerucut atau gelombang, menjadi bukti empiris bahwa varians residual dalam model ini bersifat homoskedastis. Hasil ini memperkuat validitas model regresi penelitian, karena mengonfirmasi bahwa asumsi klasik mengenai homogenitas varians residual telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.744	4.598		1.684	.098
	Total Kompetensi SDM (X1)	.100	.154	.088	.650	.518
	Total Transparansi (X2)	.490	.136	.476	3.600	<.001
	Total SPI (X3)	.182	.107	.247	1.698	.095

a. Dependent Variable: Total Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS 2025

Mengacu pada koefisien Unstandardized pada Tabel 8, persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah:

$$Y=7,744+0,100X1+0,490X2+0,182X3+e$$

a. Konstanta

Besaran konstanta sebesar 7,744 merefleksikan nilai dasar variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) ketika semua variabel independen dalam model dianggap tidak memberikan kontribusi atau bernilai nol. Angka konstanta sebesar 7,744 menunjukkan nilai dasar (baseline) kualitas laporan keuangan yang ada pada instansi terkait, yang tetap bernilai positif meskipun variabel Kompetensi SDM, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern dianggap tidak memberikan kontribusi (bernilai nol).

b. Koefisien Kompetensi SDM (X1)

Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,100 untuk variabel Kompetensi SDM. Variabel kompetensi SDM tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,518 (> 0,05).

c. Koefisien Transparansi (X2)

Koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,490 menunjukkan arah pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan nilai signifikansi (p-value) < 0,001, hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima secara empiris. Fakta bahwa nilai signifikansi berada jauh di bawah 0,05 membuktikan bahwa keterbukaan informasi memegang peranan krusial dalam siklus pelaporan.

d. Koefisien Sistem Pengendalian Intern (X3)

Variabel sistem pengendalian intern menunjukkan koefisien positif sebesar 0,182, yang mencerminkan kecenderungan arah hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, temuan statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,095. Dengan mengacu pada tingkat kepercayaan 95% (alpha = 0,05), hasil ini mengonfirmasi bahwa pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial belum mencapai tingkat signifikansi yang dipersyaratkan.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 9. Hasil uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.744	4.598		1.684	.098
Total Kompetensi SDM (X1)	.100	.154	.088	.650	.518
Total Transparansi (X2)	.490	.136	.476	3.600	<.001
Total SPI (X3)	.182	.107	.247	1.698	.095

a. Dependent Variable: Total Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 9 di atas, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Kompetensi SDM (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,650 dengan nilai signifikansi 0,518, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, hipotesis H1 ditolak.
- Variabel Transparansi (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,600 dengan nilai signifikansi < 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan hasil ini, hipotesis H2 diterima.
- Variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,698 dengan nilai signifikansi 0,095, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, hipotesis H3 ditolak.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.636	3	93.879	22.567	<.001 ^b
	Residual	232.964	56	4.160		
	Total	514.600	59			

a. Dependent Variable: Total Kualitas Laporan Keuangan (Y)
 b. Predictors: (Constant), Total SPI (X3), Total Transparansi (X2), Total Kompetensi SDM (X1)

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis Uji F yang tercantum pada Tabel 10, ditemukan bukti empiris bahwa variabel Kompetensi SDM, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara kolektif memiliki kontribusi nyata dalam menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan di instansi terkait ($F = 22,567$; $p < 0,001$). Dengan tingkat signifikansi yang berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kolektif dari seluruh variabel

independen terhadap variabel dependen dinyatakan terdukung secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara kapabilitas sumber daya manusia, keterbukaan informasi, serta efektivitas pengendalian internal merupakan determinan krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan di lingkungan BKAD Kota Manado.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi ((R²))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.547	.523	2.040
a. Predictors: (Constant), Total SPI (X3), Total Transparansi (X2), Total Kompetensi SDM (X1)				

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,523, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan 52,3% varians dari Kualitas Laporan Keuangan. Meskipun model ini menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup kuat, terdapat 47,7% variasi yang dipengaruhi oleh determinan di luar cakupan studi ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kota Manado.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan hasil yang tidak signifikan dengan nilai p-value 0,518 (> 0,05), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Secara teoretis, hasil ini menarik untuk dicermati karena tidak sejalan dengan stewardship theory yang memandang bahwa kompetensi steward (aparatur) adalah determinan utama dalam menjaga kualitas kinerja organisasi. Realitas di BKAD Kota Manado menunjukkan bahwa profil kompetensi yang dimiliki pegawai belum secara otomatis menjamin peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan argumen bahwa terdapat variabel moderasi atau hambatan operasional di luar kompetensi teknis yang memengaruhi efektivitas pelaporan keuangan pada instansi tersebut.

Ketidaksignifikanan pengaruh kompetensi SDM dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kuatnya peran sistem dan regulasi di BKAD Kota Manado. Dalam lingkungan kerja yang diatur oleh SOP yang ketat dan aplikasi keuangan yang terstandarisasi, proses pelaporan telah bersifat mekanistik. Sistem ini berperan sebagai kontrol yang kuat, sehingga mampu memitigasi keterbatasan kompetensi individu dan memastikan bahwa laporan keuangan tetap tersusun sesuai standar meskipun tanpa pengaruh dominan dari kompetensi pegawai secara personal. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pada

instansi tersebut merupakan produk dari sinergi sistemik melalui koordinasi antarbagian bukan sekadar akumulasi dari kompetensi individu di unit kerja terkait.

Ketidaksignifikanan pengaruh kompetensi SDM dalam penelitian ini juga dapat diatribusikan pada karakteristik responden yang cenderung homogen. Dengan tingkat pendidikan yang mumpuni dan akumulasi pengalaman kerja yang relatif setara, seluruh pegawai memiliki pemahaman yang seragam terhadap tata kelola keuangan di instansi tersebut. Keterbatasan variasi data pada variabel kompetensi SDM menjadi salah satu faktor mengapa pengaruhnya tidak terlihat menonjol dalam model statistik yang dibangun. Argumen ini sejalan dengan temuan Shanti et al. (2024), yang mengemukakan bahwa dalam organisasi yang telah menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis standar dan kaku, kualitas output laporan cenderung lebih ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap sistem dibandingkan oleh variasi kompetensi personal pegawai. Dengan demikian, sistem yang terstandarisasi dapat meminimalisasi peran dominan kapabilitas individu, sehingga perbedaan tingkat kompetensi antarpegawai tidak berimplikasi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BKAD Kota Manado. Pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dikonfirmasi melalui nilai signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Penerimaan H2 ini menegaskan bahwa transparansi merupakan determinan krusial dalam mekanisme pelaporan keuangan di BKAD Kota Manado. Dengan menerapkan prinsip transparansi, setiap proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terukur dan terpantau, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas output laporan. Laporan keuangan yang disusun dengan transparansi tinggi tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi publik yang andal karena menyajikan data yang jujur, jelas, dan transparan mengenai posisi keuangan daerah.

Selaras dengan *stewardship theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi instrumen krusial dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hubungan positif yang ditemukan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan membuktikan bahwa ketika aparatur pemerintah berperan sebagai *steward* yang jujur, mereka akan menempatkan transparansi sebagai prioritas utama dalam pelaporan. Praktik transparansi, seperti penyediaan akses informasi keuangan yang mudah dipahami dan terbuka bagi publik, tidak hanya memenuhi kewajiban normatif pemerintah tetapi juga bertindak sebagai mekanisme kontrol diri (*self-control*) bagi pegawai. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, aparatur terdorong untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih cermat, sehingga integritas dan kualitas data keuangan tetap terjaga dari potensi distorsi atau penyimpangan.

Temuan ini selaras dengan literatur terdahulu, sebagaimana dinyatakan dalam studi Zubaidah dan Nugraeni (2023) serta Rahayu dan Dewi (2022), yang menekankan peran sentral transparansi bagi kualitas laporan keuangan sektor publik. Keselarasan hasil ini menunjukkan bahwa di lingkup BKAD Kota Manado, transparansi bukan sekadar pemenuhan kewajiban prosedural, melainkan elemen substantif yang meningkatkan akurasi dan kualitas data keuangan. Dengan demikian, langkah-langkah strategis untuk memperluas aksesibilitas data keuangan dan memastikan kejernihan penyajian anggaran harus terus dioptimalkan sebagai upaya berkelanjutan dalam mencapai standar kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan ($p > 0,05$). Berdasarkan hasil statistik dengan t-hitung 1,698 dan p-value 0,095, hipotesis ketiga (H3) tidak dapat diterima. Secara teoretis, hasil ini cukup menarik untuk dicermati karena kontradiktif dengan paradigma umum yang menempatkan sistem pengendalian intern sebagai instrumen vital dalam pelaporan keuangan. Ketidaksignifikanan ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara desain sistem pengendalian intern yang ada dengan implementasi praktisnya di BKAD Kota Manado, sehingga dampak positif dari pengendalian internal belum mampu dirasakan secara optimal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

Meskipun stewardship theory menekankan peran sistem pengendalian intern sebagai pilar utama dalam menjamin akuntabilitas dan keandalan data keuangan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang berbeda. Secara ideal, pengendalian intern yang efektif seharusnya mampu meminimalkan error dan memastikan integritas proses pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban steward kepada publik. Namun, hasil statistik menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern belum mencapai taraf signifikansi yang diharapkan. Hal ini menyiratkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan di BKAD Kota Manado saat ini mungkin masih menghadapi hambatan implementasi atau belum terintegrasi secara penuh dalam siklus pelaporan, sehingga perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan belum dapat terobservasi secara signifikan.

Fenomena tidak signifikannya pengaruh sistem pengendalian intern dapat diatribusikan pada sifat implementasinya yang lebih mengutamakan aspek administratif daripada substansi kontrol yang esensial. Di BKAD Kota Manado, proses pengendalian sering kali terjebak dalam rutinitas otorisasi dokumen, yang meskipun penting, tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas substantif laporan keuangan. Kualitas laporan lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal lainnya, seperti penyesuaian terhadap regulasi terbaru, keandalan sistem aplikasi keuangan, dan soliditas koordinasi antarunit. Hasil ini memberikan konfirmasi empiris atas temuan Ira Gustina (2021) serta Siti Umamu K. et al. (2024), yang mencatat bahwa di berbagai entitas sektor publik, sistem

pengendalian intern tidak selalu mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Pengaruh Kompetensi SDM, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji F mengonfirmasi bahwa ketiga variabel independen secara simultan memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara signifikan. Hasil ini mendukung diterimanya hipotesis keempat (H4, yang menekankan pentingnya sinergi ketiga variabel sebagai determinan kualitas pelaporan. Menarik untuk disimpulkan bahwa terdapat divergensi antara hasil uji parsial dan simultan di mana variabel yang secara individual tidak signifikan (Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern) justru memberikan kontribusi berarti ketika diuji secara bersama-sama dalam model. Temuan ini menunjukkan adanya interaksi sistemik, di mana efektivitas pelaporan keuangan daerah di BKAD Kota Manado tidak ditentukan oleh satu variabel saja, melainkan oleh perpaduan faktor manusia, sistem, dan transparansi yang saling melengkapi.

Pembahasan Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R Square yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,523 atau 52,3%. Angka ini mengindikasikan bahwa variasi Kualitas Laporan Keuangan pada BKAD Kota Manado dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi SDM, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan sebesar 52,3%. Sementara itu, sisa variasi sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Merujuk pada Ghazali (2018), koefisien determinasi ini merefleksikan daya jelas (explanatory power) model yang cukup moderat hingga kuat. Adapun sisa variasi yang tidak ter jelaskan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti akuntabilitas publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, maupun komitmen organisasi.

Ketidaksignifikanan secara parsial pada beberapa variabel tidak menafikan relevansi model secara keseluruhan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang diperoleh. R^2 pada dasarnya menangkap "kekuatan penjelas" model secara holistik. Pola ini sejalan dengan temuan Dadut dan Retnani (2021) yang menunjukkan bahwa model dengan daya penjelas tinggi (78,9%) tetap dapat dihasilkan meskipun hanya sebagian kecil variabel yang terbukti signifikan secara individu. Hal ini mengonfirmasi bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini bekerja secara sinergis. Adanya variasi nilai determinasi adalah konsekuensi logis dari perbedaan konteks organisasional dan karakteristik data spesifik pada masing-masing lokasi penelitian. Oleh karena itu, secara metodologis, model ini tetap memiliki daya penjelas yang kuat bagi kualitas laporan keuangan di BKAD Kota Manado melalui kontribusi gabungan dari ketiga variabel independen yang digunakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BKAD kota Manado, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 0,650 dengan signifikansi 0,518 > 0,05 sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.
- b. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung sebesar 3,600 dengan signifikansi < 0,001 sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
- c. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan Nilai t-hitung sebesar 1,698 dengan signifikansi 0,095 > 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.
- d. Kompetensi SDM, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi < 0,05..
- e. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,523 menunjukkan bahwa 52,3% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variable penelitian (Kompetensi SDM, Transparansi, dan SPI). Sementara itu, 47,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti komitmen organisasi, akuntabilitas publik, sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta gaya kepemimpinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Mengingat transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, BKAD Kota Manado disarankan untuk mengoptimalkan aksesibilitas informasi keuangan, mendorong keterbukaan siklus penganggaran, serta memperkuat kanal diseminasi data kepada publik. Di sisi lain, meskipun variabel Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) belum menunjukkan signifikansi secara parsial, BKAD tetap perlu melakukan penguatan berkelanjutan melalui pelatihan teknis bagi staf, penyempurnaan mekanisme pembagian tugas, serta memastikan efektivitas implementasi SPI agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga secara optimal.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan untuk mengeksplorasi determinan kualitas laporan keuangan yang lebih luas, seperti variabel akuntabilitas, komitmen organisasional, dan integrasi teknologi informasi. Mengingat keterbatasan dalam metode survei, peneliti mendatang dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengungkap realitas praktik penyusunan laporan keuangan secara lebih substantif,

melampaui data statistik yang ada, serta memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai tantangan operasional di instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., & Suwondo, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 78-89. <https://doi.org/10.35313/iarj.v4i1.5547>.
- Ferlia, T. M., Setiyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45-56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>.
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustina, I. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1).
- Hantono, dkk. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermedite Accounting IFRS Edition*. 3rd Edition. United States of America: Wile.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
- Rahayu, Komang Novita Sri, and Luh Gede Kusuma Dewi. 2022. "Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13(2): 464- 71.
- Sudiarti, N. W., & Juliarsa, G. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD. *EJurnal Akuntansi*, 30(7), 1725.
- Sumarsan, T (2020), *Perpajakan Indonesia*. Indeks. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Zubaidah, A., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978-988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>.